

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. (Harbani Pasalong, 2008 :38)

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah" jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah. (Edi Suharto, 2005:44)

David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

William N. Dunn (Kristian Widya W, 2006) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang

saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Edwards dan Ira Sharkansky (Irfan Islamy, 2003:18) kemudian mengatakan bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melaksanakannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.
3. Serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah Sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial kebijakan publik bisa juga dirumuskan

berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kermgka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Merujuk uraian definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa : 1) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, 2) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, 2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu :

- 1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, 2) Redistributive, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, 3) Distributive, yaitu melakukan

distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan
4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

2.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2013, Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari dalam buku (Harbani pasalong, 2008) Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagi cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2004:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.3. Faktor Keberhasilan Implementasi

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan daripada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah Semakin tinggi derajat kesesuaiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan. Menurut Meter dan Horn, merumuskan secara sederhana bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah faktor dukungan sumber daya, karakteristik pelaksanaan kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (Harbani Pasalong, 2008), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Menurut Riant Nugroho (2006:179), pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sisi; *Pertama*, sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. *Kedua*, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan. *Ketiga*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaannya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut berperan serta yaitu masyarakat dan swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, Yaitu: *Pertama*, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. *Kedua*, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang tidak efektif dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan dalam implementasi kebijakan yaitu : *Pertama*, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga

perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. *Kedua*, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik dan implementasi kebijakan, interpretive intutions yang berkenaan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tepat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategi dan dukungan teknis.

2.4. Faktor Penghambat Implementasi

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut J.A.M Marse (Tangkilisan, 2004:10), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil daripada kebijakan tersebut.

3. Dukungan

Sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Artinya sebuah kebijakan tidak bisa lepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "Evaluasi kebijakan". Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berbeda dengan J.A.M Marse, Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan

pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

- 1) Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- 2) Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada Implementors membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan

membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

2.5. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Dalam Pasal 77 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi dijelaskan dalam pasal 80 UU nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Dari pasal nomor 80 UU 22 Tahun 2009 di atas dapat kita lihat pennggolongan Surat Izin Mengemudi, pada huruf (d) disebutkan bahwa penngguna sepeda motor menggunakan Surat Izin Mengemudi 'C'. Dalam Pasal 81 ayat (1) di jelaskan bahwa:

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, seseorang harus memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;

b. pengisian formulir permohonan; dan

c. rumusan sidik jari.

(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan

b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ujian teori;

b. ujian praktik; dan/atau

c. ujian keterampilan melalui simulator.

Apabila pelanggar lalu lintas tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka diatur dalam pasal 281 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Selain pasal 281 diatas, pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam pasal 288 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2.6. Peran Institusi Polri Dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas

Dalam Tontowi (2002:256) karakter Polisi secara uniformitas diharapkan menjadi aparat keamanan yang melakukan 3 (Tiga) fungsi, ketiga ciri tersebut antara lain:

1. Peran sebagai perlindungan masyarakat (*to protect the people*)
2. Sebagai pelayan masyarakat (*to serve*), dan
3. Sebagai pemelihara ketertiban (*to maintain order*)

Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan

- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Erma (2008:78) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, hewan di jalan yang diperuntukkan bagi umum. Fungsi Lalu Lintas Kepolisian antara lain:

1. Penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur lalu lintas, menjaga atau mengawasi lalu lintas, mengawal lalu lintas, patroli lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas. Melakukan pembinaan dan pendidikan masyarakat dengan cara melaksanakan berbagai macam kegiatan teroganisir, yaitu patroli keamanan sekolah, pramuka lalu lintas, dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan penerangan dan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, film, serta brosur.
3. Operasional Manajemen dan Rekayasa lalu lintas. Meliputi kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas. Juga pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, alat-alat pengatur lalu lintas, dan sebagainya.
4. Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor, penyelenggaraan perizinan mengemudi kendaraan bermotor, penyelenggaraan

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pengolahan data lalu lintas.

2.7. Faktor-faktor yang menimbulkan Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas

Dalam Tim Alumni (2003:35) Terdapat 4 (empat) faktor yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas, antara lain:

1. Manusia

Manusia yang bersikap moral tidak baik, misalnya: merasa berkuasa, kaya, masa bodoh, mementingkan diri sendiri, sombong, ingin mendapat pujian dan sanjungan, ugal-ugalan dan manusia yang salah paham dalam menganggap hidup mati ditangan tuhan, sehingga tidak berusaha supaya berhati-hati dan waspada.

Unsur manusia sering menjadi penyebab utama gangguan lalu lintas. Unsur manusia terdiri dari pengemudi, penumpang, pengusaha dan pengguna jalan lainnya.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tidak memenuhi syarat seperti mesinnya rusak, ukurannya yang tidak sesuai dan umur yang sudah terlalu tua dapat dengan mudah menimbulkan gangguan lalu lintas.

3. Jalan

Jika beberapa simpang 4 (empat) terlalu berdekatan, keadaan jalan yang rusak, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas atau tidak ada dan juga kepadatan lalu lintas karena jalan tidak memenuhi syarat.

4. Lingkungan

Lingkungan misalnya: kabut, hujan deras yang mengakibatkan jalan licin dan rusak, banjir, tanah longsor, dll.

2.8. Remaja (Pelajar)

Dalam website <http://elib.unikom.ac.id> masa, remaja disebut sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar mengenai kematangan fungsi-fungsi rokhaniah dan jasmaniah. Yang sangat menonjol pada periode ini adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri sendiri dengan mana anak muda mulai meyakini kemauan, potensi dan cita-cita sendiri.

Pada saat pertumbuhan ini anak muda atau pubescens (12-17 tahun) pada umumnya mengalami satu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rokhani. Kadang harmoni fungsi-fungsi motoriknya terganggu. Sehingga dengan kejadian tadi pubescens sering tampak kaku dan kasar.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam tiga fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut juga masa pueral atau pra-pubertas.
- b. Masa pubertas sebenarnya mulai pada umur 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada pubertas anak laki-laki.
- c. Fase adolesensi mulai pada usia 17 tahun sampai sekitar 19-21 tahun.

Usia antara 5-11 tahun disebut sebagai masa latensi atau masa terikat. Pada periode ini macam-macam potensi dan kemampuan anak masih bersifat “tersimpan” atau belum berkembang. Maka akhir masa latensi itu disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas. Beberapa ahli mengemukakan bahwa usia 12-14

tahun merupakan masa pueral. Masa pueral atau masa pra-pubertas ini ditandai oleh berkembangnya tenaga pada fisik yang melimpah. Keadaan tersebut menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung, kurang sopan, liar dan lain-lain. Pada saat ini pertumbuhan jasmani sangat pesat. Bersamaan dengan pertumbuhan yang sangat cepat, berlangsung juga perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Perkembangan intelektual ini membangunkan macam-macam fungsi psikis dan rasa ingin tahu sehingga tumbuh dorongan yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Minat anak-anak puer itu sepenuhnya terarah pada hal-hal yang kongkrit. Khususnya karena minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis. Mereka belum menyukai teori-teori dan hal-hal yang abstrak. Sehubungan dengan daya tahan anak yang besar, dan pertumbuhan jasmani yang pesat, orang menandai proses ini dengan vitalitas yang besar. Oleh karena itu pada usia pra-pubertas atau pueral dan usia pubertas minat anak tertuju kepada aktivitas jasmaniah. Bentuk aktivitas jasmaniah ini penting artinya penyaluran luapan energi yang berlimpah. Ini juga sebagai pemuas bagi kebutuhan anak untuk bergiat dan kebebasan dirinya.

Dengan adanya perkembangan fisik yang melimpah terjadilah peningkatan aktivitas. Namun bentuk dan isi aktivitas tersebut berbeda pada anak gadis dan anak laki-laki. Peningkatan aktivitas tersebut bukannya berarti peningkatan agresivitas anak akan tetapi merupakan:

- a. Proses intensifikasi dari daya adaptasi anak terhadap realitas dunia.

- b. Merupakan usaha untuk lebih menguasai lingkungannya, dan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup.

Semua kegiatan itu dimungkinkan oleh adanya prinsip perkembangan yang aktif dan dinamis pada anak. Sumber dari semua aktivitas tersebut ialah:

1. Dorongan untuk tumbuh atau kemampuan untuk menjadi sesuatu.
2. Dorongan untuk mandiri.

Maka pada setiap individu normal selalu terdapat dorongan perkembangan untuk berproses menjadi sesuatu, yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan yang dinamis. Perkembangan yang dinamis ini berlandaskan pada beberapa faktor seperti faktor bawaan sejak lahir atau faktor keturunan yang ditunjang oleh macam-macam pengaruh dari lingkungan. Disamping itu, dorongan berkembang selamanya disertai dorongan berjuang dan dorongan mencapai prestasi. Di samping itu, pada fase pra-pubertas atau pueral terdapat pula gejala melemahnya ikatan-ikatan afektif dengan orang tua. Maka pada anak puer ini timbul peningkatan dari:

1. Rasa tanggung jawab,
2. Rasa kebebasan,
3. Rasa ego-nya.

Pada usia pueral ini juga timbul kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang hebat-hebat. Namun perasaan hidup positif kuat ini juga sering membawa anak muda pada aktivitas mengasingkan diri. Yaitu menjauhkan diri dari kekuasaan orang tua, lalu menggerombol dengan kawan-kawan sebayanya dalam usahanya mendapatkan pengakuan terhadap dirinya

khususnya dengan maksud mendapatkan dukungan fisik dan dukungan moril dari kawan-kawan sebayanya. Namun tampaknya yang ditemukan oleh anak-anak prapuber ini adalah perasaan-perasaan ketidak mantapan, tidak stabil, tidak puas dan ketidak mengerti.

Kontak sosial anak puer dengan kawan-kawannya sifatnya masih primitif dan masih longgar. Relasi anak puer adalah sehabat-sahabatnya ataupun dengan salah satu temannya. Relasi tersebut bersifat eksklusif dan unsur kesetiaan dijunjung tinggi. Khususnya anak-anak menghargai rasa loyal dan solider terhadap penderitaan.

2.9. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Nur Fitriyani pada tahun 2013 di Kota Makassar tentang *Penerapan Pasal 288 UU nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang dilihat dari jumlah pelanggar lalu lintas per tahun dan dilihat dari penerapan sanksi pidana denda bagi pelanggar, belum efektif menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas di setiap tahunnya yang disebabkan oleh sikap apatis dari para pengemudi kendaraan bermotor, sering mengabaikan peraturan berlalu lintas, ketidakdisiplinan dan faktor lupa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mohammad Roni Mustofa pada tahun 2013 di Jakarta dengan judul *Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan*

Jalan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penegakan hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena : a. Ketidakjelasan pengaturan makna “penyelenggara jalan” apakah secara kelembagaan ataukah Pejabat yang berkewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan). b. Menemukan alat bukti bahwa “penyelenggara jalan” tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan pengetahuan ilmu lokum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas sebagai penyidik Polri.

2.10. Konsep Pelaksanaan tugas/ pelayanan dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah.

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

37

yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisaa’ (4) Ayat 135)

Tafsir dan ayat diatas menurut M. Quraish Shihab adalah setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.

Hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Sebagai rakyat yang mempunyai pemimpin kita diminta untuk taat kepada pemimpin beserta perintahnya selama tidak bertentangan kepada ajaran islam.

Allah SWT berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (SURAT 4. AN NISAA': 59)

Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda rasulullah SAW: *Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa'i).*

Pemimpin juga diperintahkan untuk selalu melayani rakyatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *Barangsiapa disertai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad)*

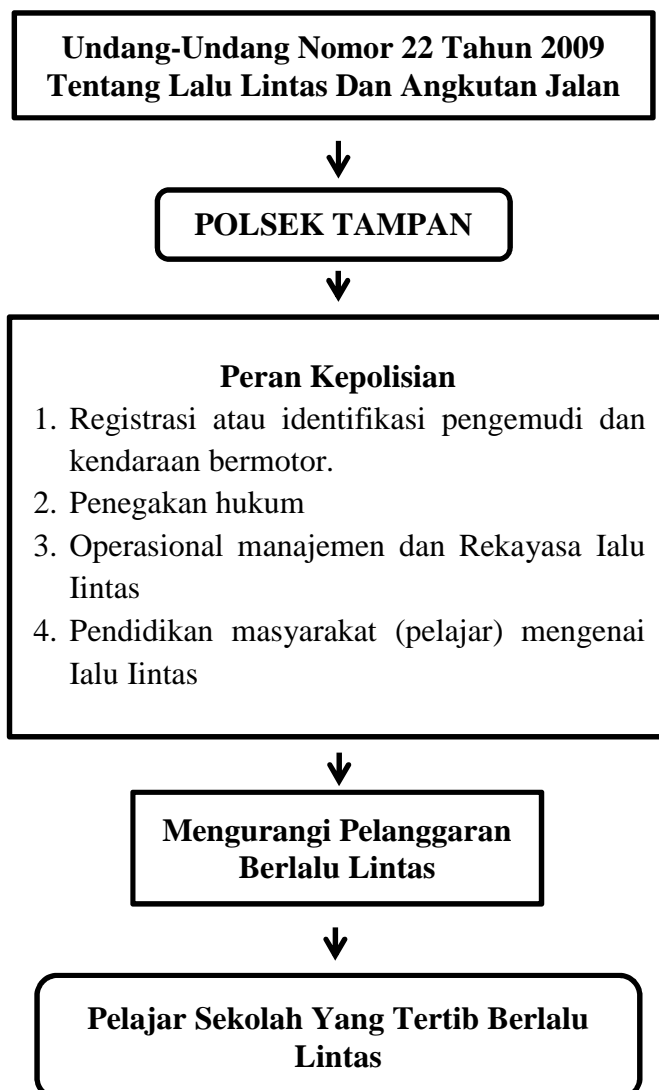
Di dalam islam juga dikatakan bahwasannya seorang pemimpin haruslah memiliki sifat Sidik (benar), Amanah (dipercayai), Tabligh (menyampaikan), Fatanah (cerdas). Dan seorang suatu wilayah juga harus menjalankan tugasnya dengan baik karena menyangkut dengan kehidupan dan kesejahteraan orang banyak. Rasulullah saw bersabda:

“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka.” (HR. Abu Na’im)

Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Islam juga menjaga Kualitas SDM Aparat yang unggul guna mewujudkan Clean & Good Governance. Keunggulan SDM para aparat yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pelayanan berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

2.11. Kerangka Pemikiran



2.12. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-undang 22 tahun 2009 dalam mengurangi pelanggaran berkendara terhadap Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tampan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pasal 7 ayat 2 huruf e yang dilaksanakan oleh Polisi Sektor (Polsek) Tampan, yang meliputi: Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pendidikan berlalu lintas, serta Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.

2. Polisi sektor (Polsek) Tampan merupakan struktur kepolisian ditingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Tampan.
3. Pelanggaran berkendara yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 281 dan 288 ayat 2 yaitu pelanggaran menggunakan sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi pada pelajar Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di kecamatan Tampan yang berumur di bawah 17 tahun.
4. Pelajar adalah siswa Sekolah Menengah Pertama dan siswa Sekolah Menengah Atas. Namun pelajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Tampan.

2.13. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai:

1. Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor adalah kegiatan Polisi Republik Indonesia untuk melakukan registrasi calon pengemudi dan kendaraan serta pendataan data lalu lintas disuatu daerah. Kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor ini bukan merupakan tugas dan wewenang Polisi Sektor Tampan, melainkan wewenang dari Polisi

Resort Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Riau Safety Driving Center (RSDC). Jadi, kegiatan ini dilakukan di Riau Safety Driving Center (RSDC) yang merupakan bagian dari Polisi Resort Kota Pekanbaru. Karena kegiatan ini tidak dilakukan oleh Polisi Sektor Tampan, jadi penulis memutuskan untuk tidak melakukan penelitian terhadap indikator registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor ini.

2. Penegakan hukum dan rekayasa lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas adalah segala upaya yang dilakukan oleh Polisi Sektor (Polsek) Tampan untuk menindak pelajar Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di kecamatan Tampan yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Operasional Manajemen dan Rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Sektor (Polsek) Tampan untuk meneliti dan menyelidiki segala bentuk penyebab pelanggaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk pendidikan/penyuluhan yang dilakukan secara terorganisir yang diberikan oleh Polisi Sektor (Polsek) Tampan terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di kecamatan Tampan.

Variabel Dalam penelitian ini adalah implementasi. Sedangkan indikatornya penulis mengambil langsung dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 7 ayat 2 huruf e yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 : Operasional Indikator

Indikator	Sub Indikator
1. Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor, b. Penyelenggaraan perizinan mengemudi kendaraan bermotor, c. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, d. Pengolahan data lalu lintas.
2. Penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur lalu lintas b. Menjaga atau mengawasi lalu lintas c. Mengawal lalu lintas d. Patroli lalu lintas e. Penyidikan kecelakaan lalu lintas f. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
3. Operasional manajemen dan Rekayasa lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian terhadap penyebab kecelakaan dan kemacetan b. Penelitian tentang penyebab pelanggaran lalu lintas c. Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas d. Pengawasan terhadap fungsi alat-alat pengatur lalu lintas.

4. Pendidikan masyarakat (pelajar) mengenai Ialu lintas	a. Penyuluhan ke sekolah b. Himbauan tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah c. Penerangan melalui media cetak d. Penerangan melalui media elektronik e. Penerangan melalui media brosur
---	--

Sumber: Data Olahan Penelitian 2013

2.14. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis Peran Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk menanggulangi pelajar Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Tampan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka penulis melakukan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian dengan menggunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2011;107) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan.

Tabel 2.2 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2

5	Sangat Tidak Setuju	1
----------	----------------------------	----------

Sumber: Data Olahan tahun 2013